

Pengaruh Konsep Pemerintahan Terhadap Pemenuhan Aspirasi Masyarakat

Tamaulina Br Sembiring¹, Shabrina Malka Mj², Sarima Sihombing³, Ali Imamta Muham⁴, Muhammad Aulia Aditya Rahman Zebua⁵, Bagus Riandi⁶, Amanda Diyana Zahra⁷, Muhammad Fariz Nasution⁸, Tubagus Aditya Wardana⁹, Luthfi Alghifari Batubara¹⁰, Davina Sarah Azzevi¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122
amaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

The concept of government reflects the system of managing power in a country, which greatly influences the level of community involvement and providing for their needs. This article discusses the influence of various forms of government, such as democracy, monarchy, and authoritarianism, on the government's ability to fulfill people's aspirations. By analyzing theory and case studies in several countries, this article concludes that governments that provide participation and transparency are more effective in responding to people's aspirations than systems that limit the role of citizens.

Keywords: Government, community aspirations, democracy, monarchy, authoritarianism, public participation, transparency, accountability.

Abstrak

Analisis Permasalahan Guru Mata Pelajaran Geografi Kelas X dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kayan Hilir Kabupaten Sintang, merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap permasalahan studi kasus. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru geografi kelas X. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder, menggunakan teknik observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Alat pengumpul data berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Permasalahan yang dihadapi guru geografi meliputi: (1) kesulitan dalam perencanaan pembelajaran; (2) keterbatasan media pembelajaran; dan (3) kurangnya akses internet dalam pembelajaran.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, Permasalahan Guru Geografi

Copyright (c) 2025 Tamaulina Br Sembiring, Shabrina Malka Mj, Sarima Sihombing, Ali Imamta Muham, Muhammad Aulia Aditya Rahman Zebua, Bagus Riandi, Amanda Diyana Zahra, Muhammad Fariz Nasution, Tubagus Aditya Wardana, Luthfi Alghifari Batubara, Davina Sarah Azzevi

✉Corresponding author: Tamaulina Br Sembiring

Email Address: amaulina@dosen.pancabudi.ac.id (Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122)

Received 29 December 2024, Accepted 04 January 2025, Published 10 January 2025

PENDAHULUAN

Konsep pemerintahan merupakan aspek penting dalam Ilmu Negara yang menjadi dasar pengaturan kekuasaan di sebuah negara. Pemerintahan tidak hanya melibatkan struktur politik dan administrasi, tetapi juga menentukan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat menjadi ukuran utama keberhasilan sebuah sistem pemerintahan.

Harapan masyarakat mencakup berbagai kebutuhan dan tuntutan yang disampaikan melalui saluran seperti pemilu, petisi, forum diskusi, dan demonstrasi. Cara pemerintah memenuhi aspirasi ini sangat dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan yang diterapkan, karena setiap sistem memiliki mekanisme yang berbeda dalam menanggapi suara rakyat. Sebagai contoh, demokrasi dikenal sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan peluang besar bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan. Sebaliknya, sistem monarki atau otoritarianisme cenderung membatasi partisipasi masyarakat, meskipun kedua sistem tersebut sering dianggap lebih stabil atau efisien dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana berbagai bentuk pemerintahan memengaruhi kemampuan negara dalam memenuhi aspirasi masyarakat, terutama di tengah tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan akan transparansi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bentuk pemerintahan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan menyoroti pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana bentuk pemerintahan memengaruhi pemenuhan aspirasi masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik ini. Selain itu, penelitian juga menggunakan studi kasus untuk menggambarkan penerapan berbagai bentuk pemerintahan, seperti demokrasi, monarki, dan otoritarianisme, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Studi kasus difokuskan pada tiga negara sebagai representasi bentuk pemerintahan yang berbeda: Indonesia sebagai contoh demokrasi, Inggris sebagai monarki konstitusional, dan Korea Utara sebagai negara dengan sistem otoritarianisme. Ketiga contoh ini dipilih untuk memberikan gambaran yang beragam tentang bagaimana konsep pemerintahan memengaruhi hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam berbagai konteks politik, sosial, dan budaya.

Hasil analisis dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif mengenai efektivitas masing-masing bentuk pemerintahan dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk pemerintahan sangat memengaruhi kemampuan negara dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Berikut pembahasan terkait tiga bentuk pemerintahan utama yang dianalisis:

1. Demokrasi: Memberikan Ruang Partisipasi yang Luas

Sistem demokrasi menyediakan peluang besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti pemilu, petisi, dan forum diskusi publik.

Kelebihan: Demokrasi memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Kekurangan: Tantangan seperti korupsi, populisme, dan kurangnya pemahaman politik di kalangan masyarakat sering kali menghambat efektivitas demokrasi dalam memenuhi aspirasi rakyat.

Studi Kasus Indonesia: Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan berbagai saluran partisipasi, seperti pemilihan kepala daerah secara langsung dan musyawarah pembangunan. Namun,

masalah seperti politik uang dan birokrasi yang tidak efisien tetap menjadi kendala.

2. Monarki: Menawarkan Stabilitas tetapi Membatasi Partisipasi

Sistem monarki konstitusional, seperti yang diterapkan di Inggris, memungkinkan aspirasi masyarakat disampaikan melalui lembaga perwakilan, seperti parlemen. Namun, di monarki absolut, keputusan lebih banyak bergantung pada penguasa tanpa keterlibatan rakyat.

Kelebihan: Monarki sering kali menjamin stabilitas politik karena keberlanjutan kekuasaan tidak bergantung pada proses pemilu yang dinamis.

Kekurangan: Partisipasi masyarakat cenderung terbatas, terutama dalam monarki absolut, yang dapat mengurangi responsivitas terhadap kebutuhan rakyat.

Studi Kasus Inggris: Sebagai monarki konstitusional, Inggris menunjukkan bagaimana kombinasi antara kekuasaan simbolis raja dan fungsi legislatif parlemen dapat menciptakan sistem yang stabil sekaligus memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasinya.

3. Otoritarianisme: Efisiensi dalam Kebijakan tetapi Minim Partisipasi Pemerintahan otoriter biasanya terpusat pada satu pihak atau kelompok, yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat tanpa perlu persetujuan dari banyak pihak.

Kelebihan: Sistem ini sering dianggap efisien dalam menjalankan kebijakan, terutama di situasi darurat atau pembangunan ekonomi jangka pendek.

Kekurangan: Minimnya partisipasi masyarakat dan pembatasan kebebasan politik mengakibatkan banyak aspirasi rakyat yang tidak terakomodasi.

Studi Kasus Korea Utara: Sebagai negara dengan sistem otoritarianisme, Korea Utara menunjukkan efisiensi dalam mengimplementasikan kebijakan nasional. Namun, pembatasan kebebasan politik dan kontrol ketat atas masyarakat mengakibatkan aspirasi rakyat sulit tersampaikan.

Penelitian ini menegaskan bahwa bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dan transparan, seperti demokrasi, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dibandingkan sistem yang membatasi keterlibatan rakyat. Namun, masing-masing bentuk pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat memengaruhi efektivitasnya dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terpenuhi. Demokrasi, dengan mekanisme partisipasi yang lebih luas, cenderung lebih responsif dan inklusif dalam mengakomodasi kebutuhan rakyat. Namun, kendala seperti korupsi dan rendahnya pemahaman politik masyarakat dapat mengurangi efektivitas sistem ini. Di sisi lain, monarki, khususnya monarki konstitusional, memberikan stabilitas politik yang baik dengan tetap membuka ruang aspirasi melalui lembaga perwakilan. Sementara itu, sistem otoritarianisme mampu menghasilkan kebijakan secara cepat dan efisien, tetapi keterbatasan dalam partisipasi publik sering mengakibatkan aspirasi masyarakat terabaikan. Setiap bentuk pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga penting bagi

pemerintah untuk memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, terlepas dari bentuk pemerintahannya.

REFERENSI

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1996). *Perbandingan Sistem Politik: Pendekatan Modern dalam Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Heywood, A. (2014). *Politics* (4th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Huntington, S. P. (1991). *Gelombang Ketiga: Demokratisasi di Akhir Abad ke-20*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Montesquieu, C. L. (1989). *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2012). *Political Science: An Introduction* (12th ed.). Boston: Pearson.
- Setiono, B. (2010). *Prinsip-Prinsip Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Smith, A. D. (2010). *Nationalism: Theory, Ideology, History*. Cambridge: Polity Press.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.